



## Pengaruh Agresi Militer Belanda terhadap Perkembangan Politik Indonesia Tahun 1947-1949

Dini Ayu Amalia<sup>1\*</sup>, Shabrina Arriby Leone<sup>2</sup>, Jauza Alya Yurindhiya<sup>3</sup>, Romadi<sup>4</sup>, Dimas Anggoro<sup>5</sup>

<sup>1-3</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [shabrinaaribbyleone@students.unnes.ac.id](mailto:shabrinaaribbyleone@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the impact of Dutch Military Aggression I (1947) and Dutch Military Aggression II (1948–1949) on the political development of Indonesia during the early years of independence. Employing the historical method (heuristics, source criticism, interpretation, and historiography) and a qualitative diachronic-synchronic approach, the research analyses primary and secondary sources concerning internal political dynamics and the Republic of Indonesia’s international relations in the period 1947–1949. The findings reveal that both Dutch military aggressions paradoxically served as crucial catalysts for the acceleration of national political consolidation and maturation in Indonesia. The First Aggression triggered international condemnation, transformed the Republic’s status from “rebels” to a sovereign state defending its independence, strengthened national solidarity, and gave birth to the integration of armed struggle and diplomacy—the precursor to the Total People’s Defense doctrine. Meanwhile, the Second Aggression, marked by the occupation of Yogyakarta and the arrest of republican leaders, led to the establishment of the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI), closer civil-military coordination, unification of political parties and societal organizations, and heightened global pressure that ultimately resulted in the recognition of sovereignty in 1949. Overall, Dutch military pressure expedited the transformation of political structures, bolstered the legitimacy of the Republican government, and secured both de facto and de jure recognition of Indonesian independence.*

**Keywords:** *Dutch Military Aggression; Indonesian Emergency Governmen; Indonesian Political Developments; National Consolidation; Revolutionary Diplomacy.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji pengaruh Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948–1949) terhadap perkembangan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi serta pendekatan kualitatif diakronis-sinkronis, penelitian ini menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder terkait dinamika politik internal serta hubungan internasional Republik Indonesia pada periode 1947–1949. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua agresi militer Belanda justru menjadi katalis penting bagi percepatan konsolidasi dan pematangan politik nasional Indonesia. Agresi Militer I memicu kecaman internasional, mengubah status Republik dari “pemberontak” menjadi negara yang sedang dipertahankan kedaulatannya, memperkuat solidaritas nasional, serta melahirkan integrasi strategi perjuangan bersenjata dan diplomasi yang menjadi cikal bakal doktrin Perang Semesta. Sementara Agresi Militer II dengan pendudukan Yogyakarta dan penangkapan para pemimpin republik mendorong pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), mempererat koordinasi sipil-militer, menyatukan partai-partai politik serta organisasi masyarakat, dan meningkatkan tekanan dunia internasional hingga tercapainya pengakuan kedaulatan pada 1949. Secara keseluruhan, tekanan militer Belanda mempercepat transformasi struktur politik, penguatan legitimasi pemerintahan Republik, serta pengakuan de facto dan de jure atas kemerdekaan Indonesia.

**Kata kunci:** Agresi Militer Belanda; Diplomasi Revolusi; Konsolidasi Nasional; Pemerintahan Darurat RI, Perkembangan Politik Indonesia.

### 1. LATAR BELAKANG

Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948–1949) merupakan babak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun kemerdekaan telah diproklamasikan, Belanda tetap berupaya mewujudkan kekuasaan kolonial kembali dengan melancarkan operasi militer yang dikenal sebagai “politioele acties.” Kedua agresi militer ini menimbulkan konflik bersenjata

yang berdampak luas terhadap stabilitas politik, sosial, dan diplomasi Republik Indonesia yang masih baru dan rapuh (Ricklefs, 2008). Upaya Belanda untuk merebut kembali daerah strategis di Jawa dan Sumatra serta menekan legitimasi pemerintahan Republik Indonesia membawa implikasi serius terhadap dinamika politik nasional pada masa itu.

Agresi Militer Belanda yang pertama adalah salah satu akal licik Belanda untuk memaksakan kehendak mereka terhadap Republik Indonesia melalui tindakan kekuasaan militer. Upaya ini dilakukan karena kegagalan Belanda dalam peristiwa perundingan Linggarjati di mana hasilnya tidak memenuhi hal yang diharapkan oleh Belanda, Menurut mereka pemerintah Indonesia belum pantas memiliki kekuasaan penuh atas negara Indonesia (Yuliani, 2014).

Peristiwa yang menjadi permulaan dari Agresi Militer kedua adalah ketika pasukan penjaga Belanda memberikan serangan ke Lapangan Terbang Maguwo tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948. Lapangan tersebut terletak enam kilometer ke arah timur dari kota Yogyakarta yang pada masa itu Yogyakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia (Rizal, 2021) Melalui serangan tersebut Agresi Militer Belanda yang kedua pun mulai terjadi.

Permasalahan pokok yang muncul dari agresi militer tersebut adalah bagaimana konflik bersenjata antara 1947–1949 mempengaruhi proses pembentukan kebijakan politik Indonesia, konsolidasi kekuasaan pemerintahan, serta strategi diplomasi internasional. Agresi Militer Belanda menuntut pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan strategi politiknya, termasuk pembentukan pemerintahan darurat, perubahan pusat kekuasaan, serta peran militer yang semakin sentral dalam pengambilan keputusan politik (Nasution, 1983). Hal ini terlihat dalam berbagai perlawanan rakyat di daerah-daerah seperti Jawa dan Sumatra yang tidak hanya bersifat militer tetapi juga memiliki implikasi politik lokal dalam mempertahankan kedaulatan (Safitri, 2025; Mahardika, 2023).

Dalam konteks global pasca-Perang Dunia II, Agresi Militer Belanda turut membawa persoalan Indonesia ke dalam arena politik internasional, khususnya melalui keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konflik ini tidak hanya mencerminkan pertentangan antara negara bekas jajahan dan kekuatan kolonial, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika politik internasional dan kepentingan negara-negara besar pada masa awal Perang Dingin (McMahon, 1981). Beberapa kajian menunjukkan bahwa tekanan internasional akibat agresi militer justru memperkuat legitimasi politik Republik Indonesia dan mempercepat proses pengakuan kedaulatan secara *de jure* pada tahun 1949 (Taylor, 1963).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang untuk memecahkan persoalan dengan menganalisis pengaruh Agresi Militer Belanda terhadap perkembangan

politik Indonesia pada periode 1947–1949 melalui pendekatan historis. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia, dinamika hubungan sipil-militer, serta peran diplomasi internasional dalam merespons agresi militer Belanda. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen perundingan, arsip diplomatik, serta kajian akademik terdahulu dari jurnal ilmiah (Ricklefs, 2008; Kahin, 1952; McMahon, 1981). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana agresi militer Belanda tidak hanya mengancam eksistensi Republik Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam membentuk arah perkembangan politik nasional menuju pengakuan kedaulatan.

Secara teoritik, penelitian ini berpijak pada konsep nasionalisme dan konflik kolonial dalam proses pembentukan negara bangsa (*nation-state*). Nasionalisme dalam konteks Indonesia tidak hanya dipahami sebagai semangat perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang mendorong konsolidasi kekuasaan dan legitimasi negara di tingkat domestik maupun internasional (Kahin, 1952). Selain itu, teori konflik kolonial menempatkan agresi militer sebagai instrumen politik kekuasaan yang digunakan oleh negara kolonial untuk mempertahankan dominasi, namun dalam banyak kasus justru memicu resistensi politik yang lebih luas dan memperkuat solidaritas nasional di pihak negara jajahan (Ricklefs, 2008). Dari sudut pandang hubungan internasional, keterlibatan PBB dan negara-negara besar dalam konflik Indonesia–Belanda menunjukkan bagaimana konflik lokal dapat berkembang menjadi isu internasional yang memengaruhi arah kebijakan politik suatu negara baru (McMahon, 1981).

## 2. METODE PENELITIAN

Menurut Kuntowijoyo (2013:89), metode sejarah adalah proses ilmiah yang sistematis yang mencakup empat tahap pokok, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Pendapat lain dikemukakan oleh Louis Gottschalk (1986:32) bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman serta peninggalan-peninggalan masa lampau (the process of critically examining and analyzing the records and survivals of the past). Sementara itu, Helius Sjamsuddin (2017:92) menyatakan bahwa metode sejarah adalah prosedur ilmiah untuk mengumpulkan, menguji keabsahan, menafsirkan, dan menyajikan fakta-fakta sejarah secara sistematis dan objektif.

Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, peneliti berpendapat bahwa metode historis sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena data yang dianalisis bersumber dari masa

lampau sehingga memerlukan kritik sumber yang ketat, interpretasi yang hati-hati, serta rekonstruksi peristiwa secara utuh dan akurat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode historis merupakan cara ilmiah yang sistematis, kritis, dan analitis untuk mengkaji peristiwa atau problematika masa lalu secara deskriptif-analitis melalui tahapan pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami peran dan dampak Agresi Militer Belanda I dan II terhadap perkembangan politik Indonesia pada tahun 1947–1949, terutama dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pembentukan opini internasional, serta dinamika partai-partai politik, dan konsolidasi negara Republik Indonesia yang baru lahir.

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh, dan menghasilkan eksplanasi historis yang memadai, penelitian ini memerlukan kajian historis yang bersifat diakronis (melacak perkembangan peristiwa secara kronologis dari sebelum Agresi Militer Belanda I Juli 1947 hingga pasca-Konferensi Meja Bundar 1949) sekaligus analisis sinkronis (mengkaji hubungan dan interaksi antar unsur politik, militer, diplomatik, dan sosial dalam setiap fase agresi secara mendalam). Pendekatan diakronis-sinkronis ini memungkinkan peneliti tidak hanya merekonstruksi urutan peristiwa, tetapi juga mengungkap makna, sebab-akibat, serta implikasi politik jangka panjang dari kedua agresi militer Belanda terhadap proses pembentukan identitas dan kedaulatan politik bangsa Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kondisi Politik Indonesia Menjelang Agresi Militer Belanda**

Indonesia, yang muncul sebagai negara baru, harus memenuhi persyaratan kedaulatan negara, yang meliputi memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara-negara lain. Namun, kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya diakui oleh negara-negara lain.

Orang Belanda, khususnya, terus berusaha untuk merebut kembali wilayah Indonesia dengan bergabung bersama Sekutu. Pasukan Sekutu baru mendarat di Indonesia setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada Sekutu. Pada tanggal 29 September 1945, pukul 10:00 pagi, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima Tertinggi AFNEI (Pasukan Sekutu Hindia Belanda), mendarat di Jakarta. Komandan ini membawa tiga divisi yang terdiri dari tentara India. Satu divisi (Divisi India ke-23) ditempatkan di wilayah Jakarta, satu divisi (Divisi India ke-5) ditempatkan di wilayah Surabaya, dan divisi lainnya (Divisi India ke-26) ditempatkan di Medan dan Padang untuk wilayah Sumatra (G.A. Warmansjah, 1991:103).

Keraguan rakyat Indonesia terhadap Belanda, yang ingin kembali menduduki Indonesia, mencapai puncaknya karena Belanda berani melakukan tindakan yang menghina para pemimpin Indonesia, yang mengakibatkan kekacauan dan bahkan pertempuran. Melihat jumlah korban yang besar dalam pertempuran antara Indonesia, Inggris, dan Belanda, Inggris ingin menunjukkan bahwa kedatangannya di Indonesia bukanlah untuk tujuan berperang dan menimbulkan kekacauan, dan berusaha untuk mempertemukan Republik Indonesia dan Belanda dalam negosiasi untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai.

Pembicaraan politik dimulai di Jakarta, bergantian antara Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara), tempat para anggota komisi umum menginap, dan kediaman resmi Sutan Syahrir di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 (sekarang Jalan Proklamasi). Negosiasi di kediaman Sutan Syahrir dipimpin oleh Schermerhorn, sementara negosiasi di Istana Rijswijk dipimpin oleh Sutan Syahrir. (A.B. Lopian & P.J. Drooglever, 1992: 17)

Pertemuan informal antara Indonesia dan Belanda tidak menghasilkan solusi definitif untuk masalah yang ada. Pada pertemuan berikutnya pada 4 November 1946, disepakati bahwa negosiasi lebih lanjut akan diadakan di Linggarjati berdasarkan draf perjanjian yang terdiri dari 17 pasal yang disusun oleh Komisi Umum Belanda. Pada hari yang sama, pemerintah Belanda mengakui Soekarno sebagai pemimpin Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengaruh Soekarno-Hatta, yang memainkan peran sangat penting dalam negosiasi politik Indonesia-Belanda. “Melalui Komisi Umum pada 4 November 1946, pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa merupakan fakta bahwa Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia” (M.T. Thoyeb, dkk., 2004: 521).

Pada tanggal 11-13 November 1946, perundingan berlangsung di salah satu bangunan megah di Desa Linggarjati antara Indonesia dan Belanda, yang menghasilkan Perjanjian Linggarjati, sehingga bangunan tersebut sering disebut sebagai Linggarjati. Mengenai lokasi perundingan di Linggarjati pada saat itu, dapat dikatakan bahwa salah satu bangunan megah di Desa Linggarjati digunakan sebagai tempat pertemuan, sementara susunan tempat duduk para delegasi sesuai dengan protokol yang lazim dalam perundingan (M.T. Thoyeb, 2004: 513).

Hasil negosiasi pada hari pertama meliputi perubahan redaksional pada redaksi konsep Perjanjian Linggarjati dan penggabungan Pasal 6 ke dalam Pasal 1, sehingga memperluas cakupan Pasal 1. Negosiasi antara Indonesia dan Belanda pada hari pertama mencapai pembahasan Pasal 2. Hari kedua negosiasi antara Indonesia dan Belanda di Desa Linggarjati pada 12 November 1946 dihadiri oleh jumlah peserta yang sama dengan hari sebelumnya, namun pada hari kedua ini, sidang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Seperti dijelaskan sebelumnya, Negosiasi Linggarjati dipimpin secara bergantian oleh Komisi Umum

Belanda dan Perdana Menteri Republik Indonesia. Berbeda dengan hari sebelumnya, hari kedua negosiasi sangat rumit dan memakan waktu sekitar 9 jam akibat debat yang panjang antara kedua delegasi. “Dua isu tidak dapat disepakati, yaitu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia” (A.B. Lopian & P.J. Drooglever, 1992: 18).

Pihak Indonesia menjelaskan bahwa adanya perwakilan di luar negeri terkait dengan pengakuan *de facto* atas wilayah Republik Indonesia, namun penjelasan ini ditolak oleh pihak Belanda. Pembicaraan pada hari kedua segera dihentikan, dan pada malam harinya, delegasi Belanda diundang untuk makan malam bersama Presiden Republik Indonesia di kediamannya di Kuningan. Pada pertemuan makan malam tersebut, Soekarno menanyakan hasil pembicaraan yang baru saja dilakukan oleh delegasi Indonesia dan Belanda. Ternyata, delegasi Belanda hanya membahas Pasal 2 mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia. Meskipun Soekarno belum mengetahui detail persis perdebatan antara kedua belah pihak, ia bersedia menerima draf perjanjian tersebut. “...Schermerhorn menyatakan dalam poin 4 agenda, ‘pendapat ketua delegasi,’ bahwa dasar kesepakatan telah tercapai dalam pembicaraan dengan Presiden. Namun, Soetan Sjahrir mengatakan bahwa ia tidak dapat berkomentar tentang pengumuman tersebut karena ia tidak hadir pada saat itu, dan lebih baik merujuk pada “kemungkinan” sebagai dasar kesepakatan” (M.T.Thoyeb, 2004: 528). Pasal-pasal dalam draf perjanjian yang masih kontroversial atau belum disepakati oleh kedua belah pihak dibahas pada hari berikutnya, 13 November 1946. Pembicaraan dipimpin oleh Sutan Sjahrir dan dihadiri oleh anggota delegasi yang sama seperti sebelumnya, kecuali Van Mook.

Hasil negosiasi tersebut adalah kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai draf Perjanjian Linggarjati dan usulan dari delegasi Indonesia mengenai pasal tambahan tentang arbitrase. “Belanda setuju untuk memasukkan pasal tentang arbitrase, redaksinya akan diselesaikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya di Jakarta” (M.T. Thoyeb, 2004: 528). Pada tanggal 15 November 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir berhasil menambahkan pasal yang mengatur arbitrase untuk menyelesaikan perbedaan yang timbul. Dengan demikian, negosiasi antara Indonesia dan Belanda menghasilkan 17 pasal.

Hasil utama Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda adalah: Pemerintah Belanda mengakui otoritas *de facto* pemerintah Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Wilayah yang diduduki oleh pasukan Sekutu atau Belanda akan secara bertahap dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui kerja sama antara kedua belah pihak (Pasal 1). Pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia akan bekerja sama untuk membentuk NIS, yang akan mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat, dengan memperhatikan

prinsip-prinsip demokrasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri (Pasal 2, 3, dan 5 ayat 2). Pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia akan membentuk Uni Belanda-Indonesia. Dalam konteks ini, Belanda mencakup Suriname dan Curacao, sementara Indonesia merujuk pada NIS. Uni ini akan dipimpin oleh Raja Belanda dan akan mengelola administrasi kepentingan bersama (Pasal 6 dan 8). Pemerintah Belanda dan Indonesia akan berupaya memastikan bahwa pembentukan NIS dan Uni ini diselesaikan sebelum 1 Januari 1949. (Pasal 12) Pemerintah Republik Indonesia mengakui, memulihkan, dan melindungi hak milik asing (Pasal 14) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk mengurangi kekuatan militer mereka dan bekerja sama dalam urusan militer (Pasal 16, lihat juga Pasal 1) Jika terjadi sengketa antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyerahkan masalah tersebut kepada komisi arbitrase untuk penyelesaian (Pasal 17) (G. Moedjianto, 1988: 181-182).

Pada hari yang sama, perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati dalam bahasa Belanda, ditandatangani secara awal oleh kedua delegasi, sementara Perjanjian Linggarjati dalam bahasa Indonesia baru ditandatangani pada 18 November 1946. Namun, setelah Perjanjian Linggarjati dibawa oleh kedua delegasi ke negara masing-masing untuk diratifikasi, konflik pun timbul, yang pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mendukung (pro) dan menentang (melawan) perjanjian tersebut. Namun, melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara, Perjanjian Linggarjati akhirnya ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk.

Isi Perjanjian Linggarjati, yang ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara), sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menghasilkan 17 pasal dan 1 pasal penutup, dengan isi utama sebagai berikut: (1) Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto dengan wilayah yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura; (2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Kesatuan Indonesia, di mana Republik Indonesia akan menjadi salah satu negara bagiannya; (3) Negara Kesatuan Indonesia dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya.

Perjanjian Linggarjati diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Perjuangan diplomatik yang dilakukan Indonesia melalui Perjanjian Linggarjati juga diharapkan dapat memungkinkan Indonesia menjadi negara merdeka, yang ditandai dengan pengakuan internasional. “Ada dua tujuan utama, yaitu: (1) berupaya agar Republik Indonesia diakui oleh sebanyak mungkin negara di dunia, sehingga perjuangan bangsa kita tidak lagi dianggap sebagai ‘gerakan nasional’ di negara jajahan, tetapi

sebagai negara berdaulat sepenuhnya; (2) mempertahankan kekuatan fisik yang telah kita bangun” (A.B. Lapien & P.J. Drooglever, 1992: 16). Kedua negara melaksanakan ketentuan Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama, khususnya Pasal 1 yang berisi pengakuan *de facto* Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Hal ini berlanjut hingga semua tujuan bersama tercapai.

### **Agresi Militer Belanda I tahun 1947**

Gagalnya pelaksanaan perundingan Linggarjati yang dinilai tidak sejalan dengan harapan Belanda membuat Belanda melakukan Agresi Militer. Agresi Militer Belanda I merupakan tindakan untuk memaksakan kehendaknya secara militer terhadap Republik Indonesia. Tujuan dari Agresi Militer Belanda I adalah mengancurkan keberadaan NKRI dan menduduki daerah-daerah Indonesia. Pada bulan Oktober 1946, perundingan yang diadakan di Jakarta, yang membahas tentang adanya pengakuan sekutu kepada kedaulatan Republik Indonesia, sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang bentuk ketatanegaraan Belanda. Belanda ingin membentuk sistem ketatanegaraan dengan pemerintahannya yang terdiri dari Pemerintah Federal di tingkat pusat yang berdaulat ke dalam dan ke luar, namun negara bagian memiliki otonomi ke dalam tetapi semua urusan ke luar menjadi urusan pusat. Sedangkan, Indonesia tidak mau melepaskan keberadaan NKRI yang sudah didirikan. Oleh karena itu, diadakanlah Perundingan Linggarjati pada tanggal 10-12 November 1946 untuk menindaklanjuti adanya perbedaan tersebut (Yuliani, 2014).

Isi dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui Republik sebagai kekuasaan *de facto* di Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua belah pihak menyetujui untuk bekerja sama dalam pembentukan suatu Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal, di dalamnya Republik akan menjadi salah satu di antara negara-negara federal dan Ratu Belanda akan menjadi pemimpin simbolis Uni Belanda-Indonesia dari Indonesia Serikat tersebut. Namun, Belanda tidak puas akan hasil dari Perundingan Linggarjati dan menganggap RI tidak bersedia untuk menaati perundingan tersebut. Hal ini dikarenakan RI terus mengadakan hubungan dengan luar negeri yang menurut Belanda hal tersebut bukan kewenangan RI (Maharani, 2009).

Tanggal 15 Juli 1947 Van Mook melakukan deklarasi terhadap wilayah Indonesia dengan memberikan waktu untuk bangsa Indonesia dalam kurun dua minggu untuk dilakukan. Deklarasi ini diakibatkan karena kedua belah pihak saling menuduh telah melakukan pelanggaran dan saling tidak memercayai satu sama lain. Namun, pada tanggal 16 Juli 1947, Indonesia menolak deklarasi dan disiarkan dalam siaran radio. Akibat dari penolakan tersebut membuat Belanda geram dan melancarkan “aksi polisionil” sehingga membuat wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan kecil (Aprilzal, 2023; Maharani, 2009).



Namun, dengan alasan untuk menjaga keamanan (*police action*), pihak Belanda terus menerus mengirimkan tentara ke Indonesia. Selain itu, Belanda juga meyakinkan dunia internasional bahwa hal yang dilakukannya bukan agresi namun urusan dalam negeri (Christian, 2011). Belanda melakukan pelanggaran tersebut dengan tujuan untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi yang penting dan aksi tersebut ternyata sudah dipersiapkan dengan baik (Susanti, 2023). Belanda terus menekan pihak Indonesia dan melakukan upaya untuk memecah belah Indonesia dengan cara membentuk daerah otonom baru secara sepihak. Selain itu, Belanda juga melakukan politik adu domba, yang dibuktikan dengan orang-orang dari delegasi Belanda yang menghadiri perjanjian Renville adalah orang-orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda (Christian, 2011).

Akibat dari pertikaian antara Indonesia dan Belanda karena tidak adanya kemajuan dalam pelaksanaan Perjanjian Linggarjati tersebut, membuat dunia internasional kesal dan mendesak untuk melaksanakan isi perjanjian. Sehingga, India mengirim delegasinya ke Yogyakarta untuk membuka hubungan diplomatik dan perdagangan. Dan Australia yang juga mendukung upaya perdagangan dengan Indonesia. Namun, pihak Belanda tetap tidak setuju dan memprotes kegiatan Indonesia di luar negeri yang berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dan berhasil mengadakan perjanjian persahabatan (Christian, 2011).

Agresi Militer 1 yang dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947 justru menjadi katalisator utama bagi percepatan perkembangan politik Indonesia menuju pengakuan kedaulatan penuh. Agresi tersebut memicu reaksi keras dunia internasional yang selama ini masih memandang konflik Indonesia-Belanda sebagai “urusan dalam negeri Belanda”. Hal ini menjadi bukti nyata pelanggaran Belanda terhadap Perjanjian Linggarjati, sehingga dewan keamanan PBB segera mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Belanda dan menghentikan operasi militer tersebut. Dan mengubah status politik Republik Indonesia dari sekedar “pemberontak” menjadi negara yang sedang dipertahankan kedaulatannya oleh komunitas internasional (Budiman, 2017).

Di dalam negeri, Agresi Militer 1 memperkuat solidaritas nasional dan legitimasi pemerintahan Republik Indonesia. Rakyat dari berbagai lapisan semakin bersatu di belakang pemerintahan Republik, sementara perlawanan gerilya yang masif membuktikan bahwa kemerdekaan tidak dapat dipadamkan dengan kekuatan militer saja (Gajah et al, 2024). Pengalaman bertahan menghadapi agresi ini juga melahirkan integrasi strategi antara perjuangan bersenjata dan diplomasi yang berjalan paralel, yang kemudian menjadi fondasi konsep Perang Semesta sebagai doktrin pertahanan negara Indonesia hingga kini (Nurbantoro et al, 2022).

Secara diplomatik, Agresi Militer I membuka jalan menuju Perjanjian Renville dan menjadi batu loncatan penting bagi serangkaian perundingan selanjutnya, termasuk Roem-Royen hingga Konferensi Meja Bundar. Dengan kata lain, justru karena agresi inilah Belanda kehilangan legitimasi moral dan politik di mata dunia, sementara Republik Indonesia memperoleh pengakuan *de facto* yang semakin luas dan akhirnya pengakuan kedaulatan penuh pada tanggal 27 Desember 1949 (Budiman, 2017).

### **Agresi Militer Belanda II tahun 1949**

Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948 menjadi ujian militer bagi Republik Indonesia. Serangan ini mendorong lahirnya strategi politik yang baru, konsolidasi pemerintahan darurat, serta memperkuat legitimasi internasional terhadap perjuangan diplomatik Indonesia. Agresi Militer II berlangsung pada tanggal 19 Desember 1948 pada pukul 05:30 pagi, agresi ini dikenal juga dengan sebutan operasi gagak (Safitri, 2023).

Serangan Agresi Militer Belanda II dipimpin oleh Letnan Jendral Simon Spoor, panglima KNIL. Ia diperintahkan untuk mengambil paksa salah satu kota di Indonesia yaitu, Yogyakarta. Tujuan dari serangan ini adalah untuk melucuti kekuasaan Indonesia yang pada saat itu sangat bergantung kepada Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada saat itu juga dwitunggal Soekarno, Moh Hatta dan 20 ribu prajurit TNI sedang berkumpul di Yogyakarta, serangan dari Spoor berpusat di lapangan terbang Maguwo (Lubis & Artono, 2021).

Bertepatan dengan serangan yang diluncurkan di kota Yogyakarta, kota Bukittinggi juga diberikan serangan oleh pihak Belanda. Setelah serangan dari Belanda mereda, langsunglah pejabat tinggi yang berada di Bukittinggi diarahkan untuk keluar kota sementara waktu, guna menghindari penculikan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Pada waktu penyerangan tersebut wilayah yang diincar oleh Belanda adalah perkebunan teh yang berada di Dusun Halaban, sekitar 15KM dari Kota Payakumbuh.

Penyerangan Agresi Militer II Belanda dilakukan secara serentak, termasuk di provinsi Jawa Timur. Beberapa wilayah dijadikan bidikan penyerangan oleh Belanda, di antaranya Malang, Madiun, Kediri, Blitar, dan Batu Pujon. Belanda melakukan penyerangan besar di wilayah yang memiliki basis gerilya yang kuat, karena Belanda dengan mudah menculik tokoh, memutus komunikasi publik, dan pembantaian jika terdapat persembunyian TNI. Provinsi Jawa Timur adalah sasaran empuk Belanda ketika ingin mengambil alih wilayah perkebunan, karena terdapat perkebunan Malang - Besuki dan pulau Madura. Dalam pengoperasiannya Belanda kerahkan Brigade X KNIL, Brigade X memberikan serangan mulai dari Sidoarjo hingga Malang dan kedalam daerah perkebunan Malang (Kharisma, 2016).

Kota Solo (Surakarta) juga menjadi bidikan dari Agresi Militer II Belanda, Penyerangan ini dilakukan ketika Yogyakarta sudah ditaklukan dan Belanda mulai memutus jalur pemerintahan kearah Solo. Pada tanggal 20 Desember 1948, Belanda mulai memasuki kota Solo. Pukul 18:00 WIB dimulai dengan dihanguskan jembatan yang berada di kota Solo, dari sini dimulai suara ledakan bom serta tembakan - tembakan mulai terdengar. Sasaran dari Belanda adalah, kantor Gubernur, Gedung Gajah Timuran, kantor pos, Pasar Gede dan Asrama Tentara pelajar (Nur, 2019). Wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah lainnya yang menjadi bidikan Agresi Militer II Belanda adalah Magelang, Purworejo dan Kebumen yang secara garis besar mengincar untuk diputuskan jalur logistik dan melancarkan serangan kepada pasukan Diponegoro.

### **Dampak Agresi Militer Belanda I dan II terhadap Perkembangan Politik Indonesia**

Agresi Militer Belanda 1 yang terjadi pada 21 Juli-5 Agustus 1947 membawa dampak besar bagi Indonesia. Serangan dari Belanda menyebabkan kerusakan infrastuktur di banyak kota serta ratusan hingga ribuan rakyat sipil menjadi korban. Hal ini membuat perekonomian Indonesia dan stabilitas kehidupan masyarakat terguncang (Sandra, 2025).

Secara politik, Agresi Militer 1 mendorong Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional. Serangan Belanda memicu perhatian internasional, sehingga pemerintah Indonesia membawa konflik ini ke forum internasional. Langkah ini menunjukkan pergeseran strategi politik Indonesia menuju kombinasi antara perjuangan militer dan diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional (Dumadi & Romadi, 2023).

Mesir menjadi negara pertama yang secara langsung menyatakan pengakuan tersebut. Pengakuan dari negara-negara di Timur Tengah memberikan pengaruh besar bagi posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Karena pemberian pengakuan tersebut dapat memengaruhi sikap negara-negara dalam memandang konflik Indonesia dan Belanda ini (Fadhilah, 2020).

Di dalam negeri, Agresi Militer 1 juga berpengaruh terhadap menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Kondisi darurat akibat agresi menempatkan TNI sebagai aktor utama dalam mempertahankan eksistensi negara. Hal ini memperbesar legitimasi politik militer dalam struktur kekuasaan nasional, yang pada perkembangan selanjutnya memengaruhi hubungan militer di Indonesia pada masa Orde Lama (Apandi et al, 2025).

Selain itu, agresi ini memperkuat solidaritas nasional dan meningkatkan dukungan rakyat terhadap pemerintah Indonesia. Kekerasan dan juga tindakan represif yang dilakukan oleh Belanda terhadap penduduk sipil, justru mempertegas posisi politik Indonesia sebagai

pihak yang sah dan berdaulat. Dengan ini, memperkuat konsolidasi politik internal serta mempertegas bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia (Apandi et al, 2025).

Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948 membawa pengaruh besar terhadap perkembangan politik Indonesia. Ketika Yogyakarta jatuh dan para pemimpin republik ditangkap, Indonesia merespons dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menegaskan bahwa negara tetap berdiri meskipun pusat kekuasaan diguncang. Peristiwa ini juga mendorong penguatan diplomasi internasional, karena kecaman dari PBB, negara-negara Asia, dan tekanan Amerika Serikat terhadap Belanda membuat posisi politik Indonesia semakin kuat di mata dunia.

Di dalam negeri, Agresi Militer Belanda II mendorong terjadinya konsolidasi politik nasional yang jauh lebih kuat. Serangan terhadap Yogyakarta dan penangkapan para pemimpin republik membuat partai-partai politik seperti PNI, Masyumi, PSI, serta organisasi pemuda dan masyarakat, menyingkirkan perbedaan internal dan bersatu mempertahankan keberlangsungan republik. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menunjukkan kemampuan bangsa untuk menjaga kontinuitas pemerintahan meskipun berada dalam situasi krisis, dan hal ini meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap struktur politik nasional. Selain itu, agresi ini melahirkan pola kepemimpinan baru yang lebih fleksibel dan mempererat koordinasi antara kekuatan sipil dan militer. Secara keseluruhan, peristiwa ini memperkuat solidaritas politik di seluruh Indonesia dan membantu membentuk fondasi penting bagi stabilitas politik pada masa awal kemerdekaan.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menunjukkan kemampuan bangsa untuk menjaga kontinuitas pemerintahan meskipun berada dalam situasi krisis, dan hal ini meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap struktur politik nasional. Selain itu, agresi ini melahirkan pola kepemimpinan baru yang lebih fleksibel dan mempererat koordinasi antara kekuatan sipil dan militer. Secara keseluruhan, peristiwa ini memperkuat solidaritas politik di seluruh Indonesia dan membantu membentuk fondasi penting bagi stabilitas politik pada masa awal kemerdekaan.

Agresi Militer Belanda 1 dan 2 memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Agresi Militer 1 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban tetapi juga mendorong perubahan strategi politik Indonesia. Peristiwa ini juga memperkuat posisi Indonesia untuk membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia (Dumadi & Romadi, 2023; Fadhilah 2020; Sandra, 2025). Di dalam

negeri, peristiwa ini memperkuat peran militer dalam struktur politik nasional dan meningkatkan solidaritas antara rakyat dengan pemerintah Indonesia (Apandi et al, 2025).

Sementara, Agresi Militer 2 semakin memperkuat konsolidasi politik nasional ketika pusat pemerintahan diserang dan para pemimpin ditangkap. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam menjaga kontinuitas sekaligus meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik nasional. Peristiwa ini juga mempererat koordinasi antara kekuatan sipil dan militer serta menjadi pondasi penting bagi stabilitas politik Indonesia awal kemerdekaan (Apandi et al, 2025).

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Agresi Militer Belanda pada tahun 1947–1949 merupakan peristiwa yang memainkan peran penting dalam membentuk arah perkembangan politik menimbulkan kerusakan fisik dan korban tetapi juga mendorong perubahan strategi politik Indonesia. Peristiwa ini juga memperkuat posisi Indonesia untuk membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia (Dumadi & Romadi, 2023; Fadhilah 2020; Sandra, 2025). Di dalam negeri, peristiwa ini memperkuat peran militer dalam struktur politik nasional dan meningkatkan solidaritas antara rakyat dengan pemerintah Indonesia (Apandi et al, 2025).

Sementara, Agresi Militer 2 semakin memperkuat konsolidasi politik nasional ketika pusat pemerintahan diserang dan para pemimpin ditangkap. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam menjaga kontinuitas sekaligus meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik nasional. Peristiwa ini juga mempererat koordinasi antara kekuatan sipil dan militer serta menjadi pondasi penting bagi stabilitas politik Indonesia awal kemerdekaan (Apandi et al, 2025).

Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa agresi tersebut bukan hanya menghadirkan konflik bersenjata, tetapi juga memperkuat konsolidasi politik nasional melalui meningkatnya solidaritas antarkelompok, legitimasi pemerintahan Republik, serta perubahan strategi diplomasi dalam merespons tekanan internasional. Tindakan militer Belanda justru mendorong Indonesia untuk mempertegas posisi politiknya di mata dunia, yang kemudian tercermin melalui keterlibatan aktif dalam forum internasional seperti Komisi Tiga Negara (KTN) dan proses diplomasi menuju pengakuan kedaulatan. Selain itu, agresi tersebut juga mempercepat transformasi struktur politik internal, baik dalam hubungan sipil–militer maupun dalam pembentukan sistem pemerintahan yang lebih terorganisasi. Dampak di tingkat lokal pun menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap agresi turut memperkuat identitas kebangsaan yang semakin kokoh. Secara keseluruhan, agresi militer

Belanda justru menjadi katalis yang mempercepat penguatan politik Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa upaya kolonial untuk mematahkan Republik berakhir dengan semakin solidnya fondasi negara yang merdeka dan berdaulat.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pengaruh Agresi Militer Belanda terhadap perkembangan politik Indonesia pada tahun 1947–1949, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dinamika revolusi fisik dan perjuangan diplomasi melalui penguatan pendidikan sejarah yang lebih kontekstual, sehingga kesadaran politik dan nilai-nilai kedaulatan dapat lebih tertanam. Dari sisi pengembangan teori, penelitian lanjutan disarankan untuk memanfaatkan pendekatan interdisipliner—meliputi sejarah politik, hubungan internasional, dan studi keamanan—guna memperkaya analisis tentang bagaimana agresi eksternal dapat membentuk struktur politik nasional dan mengubah strategi pemerintahan. Selain itu, karena dampak agresi tidak bersifat seragam di seluruh wilayah Indonesia, penelitian selanjutnya perlu berfokus pada kajian mikro-historis di tingkat lokal untuk memahami variasi respon politik daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam historiografi nasional. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk memperluas penggunaan sumber primer, seperti arsip Belanda, dokumen PBB, laporan Komisi Tiga Negara, dan memoar tokoh-tokoh terkait, agar interpretasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan objektif. Terakhir, penting bagi penelitian mendatang untuk meninjau dampak jangka panjang agresi tersebut terhadap struktur pemerintahan, hubungan sipil–militer, serta pembentukan identitas dan sistem politik Indonesia, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kontribusi periode 1947–1949 terhadap perkembangan politik Indonesia modern.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aprilzal, T. (2023). Sejarah Untuk Mendapatkan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 12(2), 20–41. <https://doi.org/10.21009/jps.122.02>
- Budiman, A. (2017). *Sejarah diplomasi Roem–Roijen dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1949*. *Jurnal Artefak*, 4(1), 86–113.
- Christian, R. A. (2011). *Agresi militer Belanda I dan II (periode 1947–1949) dalam sudut pandang hukum internasional* (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia).
- Dumadi, S., & Romadi. (2023). Agresi Militer Belanda I dalam perspektif sejarah lokal untuk pembelajaran sejarah di SMA. *Historia Pedagogia: Jurnal Penelitian dan Inovasi Pendidikan Sejarah*, 12(1), 13–23.
- Fadhilah, N. (2020, April 18). *Makalah agresi militer Belanda I dan II*. Scribd.

- Gajah, Z. H., Zanah, A. K., Salsabilah, K., Anggi, S., Sitorus, M., Hasibuan, R. A., & Yusnaldi, E. (2024). *PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA*. 8(11), 52–59.
- Gottschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI-Press.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Kharisma, D. N. (2016). *KOTA MALANG PADA MASA AGRESI MILITER BELANDA I TAHUN 1947 AVATARA*, *e-Journal Pendidikan Sejarah*. 4(3), 942–956.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah* (Edisi 2). Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Lapian, A.B & P.J.Drooglever. 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Lubis, J. K., & Artono, A. (2021). *PERLAWANAN MASYARAKAT NGANJUK PADA MASA AGRESI MILITER BELANDA 2 PADA TAHUN 1948 SAMPAI 1949*. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(3).
- Maharani, L. (2009). *KEKUASAAN BELANDA KE PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945-1950*.
- Mahardika, M. D. G. (2023). *Dutch Military Aggression in Batu-Pujon East Java 1947–1948: A Local History*. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*.
- McMahon, R. J. (1981). Colonialism and Cold War: The United States and the struggle for Indonesian independence, 1945–1949. *Journal of American History*, 68(1), 27–52. <https://doi.org/10.2307/1887367>
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad ke 20 I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, A. H. (1983). *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia* (Jilid 2). Disjarah AD.
- Nurbantoro, E., Midhio, I. W., Risman, H., & Prakoso, L. Y. (2022). *Perang Kemerdekaan Indonesia ( 1945-1949 ) dalam Perspektif Strategi Perang Semesta*. 5, 10520–10530.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Serambi Ilmu Semesta.
- Rizal, R. (2021). Peran jenderal soedirman dalam perang griliya (studi historis masa agresi militer belanda ii tahun 1948-1949 di jawa tengah). *Danadyaksa Historica*, 1(1), 12-24.
- Safitri, A. (2023). *Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Pada Agresi Militer II 1948-1949 di Pulau Jawa*. HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah, 3(1), 23-34.
- Sandra, S.Pd., M.Pd. (2025, Maret 17). *Agresi Militer Belanda I: Upaya Menguasai Kembali Indonesia*. INCA University. <https://inca.ac.id/agresi-militer-belanda-i/>
- Sjamsuddin, Helius. (2017). *Metodologi Sejarah* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group.
- Susanti, N. (2023). *Perjuangan rakyat Selama melawan agresi Belanda* [Skripsi tidak dipublikasikan]. IAIN Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10598/1/SKRIPSI%20NELIA%20SUSANTI.pdf>
- Taylor, A. J. (1963). The Dutch–Indonesian conflict. *International Affairs*, 39(3), 335–349. <https://doi.org/10.2307/2609874>

- Thoyeb, M.T dkk. 2004. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT. Upakara Sentosa Sejahtera.
- Warmansjah, G.A., dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 DKI Jakarta*. Jakarta: Proyek IDSN.
- Yuliani, E., Sejarah, P., Sosial, F. I., Surabaya, U. N., Kasdi, A., Sejarah, P., Sosial, F. I., & Surabaya, U. N. (2014). *Agresi militer belanda i di bondowoso*. 2(1), 1–13.